

**PERKEMBANGAN MUSLIM DI EROPA (*WORLD CIVILIZATION VS LOCAL CULTURE*) : KEBIJAKAN PEMERINTAH PERANCIS DALAM MENEKAN PERTUMBUHAN MUSLIM**

**Nur Inna Alfiah**  
**fifi.alfiyah@yahoo.com**  
**Dosen Fisip Universitas Wiraraja Sumenep**

**ABSTRAK**

Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Dengan adanya globalisasi setiap perpindahan baik berupa barang ataupun peradaban menyebar dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain atau dari negara yang satu dengan negara lain. Dari globalisasi inilah kemudian kosmopolitanisme dapat tersebar dengan luas. Globalisasi kemudian memberikan dua dampak bagi kehidupan manusia, yaitu positif dan negatif. Sehingga kemudian dengan adanya globalisasi bergantung bagaimana individu, masyarakat, dan negara menyikapi fenomena globalisasi tersebut. Mudahnya penyebaran peradaban kemudian mendorong budaya dalam peradaban antar negara bertemu satu dengan yang lainnya. Pertemuan budaya-budaya tersebut kemudian menimbulkan dua hal yaitu positif dan negatif, positif apabila kebudayaan yang dibawa dalam peradaban diterima dengan baik disutu negara, sedangkan negatif apabila budaya dalam peradaban ditolak dan dianggap sebagai suatu ancaman terhadap budaya yang asli dari wilayah tersebut yang kemudian memunculkan diskriminasi yang berujung pada terjadinya konflik.

*Kata Kunci: Civilization, Local culter, Kebijakan*

## A. Latar belakang Masalah

Dalam sejarah kehidupan manusia banyak dikenal peradaban-peradaban kuno, seperti Mesopotamia, Peradaban Mesir Kuno, Peradaban Yunani kuno, Mahenjodaro dan Harappa (India) dan lainnya. Peradaban-peradaban yang ada kemudian hilang karena berbagai faktor seperti bencana alam ataupun karena adanya perang. Peradaban merupakan entitas paling luas dari budaya, perkampungan-perkampungan, wilayah-wilayah, kelompok-kelompok etnis, nasionalitas-nasionalitas, berbagai kelompok keagamaan, seluruhnya memiliki peradaban kultur pada tingkatan yang berbeda dari heterogenitas kultural. Sebuah peradaban adalah bentuk budaya yang paling tinggi dari suatu kelompok masyarakat dan tataran yang paling luas dari identitas budaya kelompok masyarakat dan tataran yang paling luas dari identitas budaya kelompok masyarakat manusia yang dibedakan secara nyata dari makhluk-makhluk lainnya. Ia teridentifikasi baik dalam faktor-faktor objektif pada umumnya, seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan-kebiasaan, institusi-institusi, maupun identifikasi diri yang bersifat subjektif (Huntington 2002, 42-43). Bahkan Huntington dalam bukunya juga mengelompokkan masyarakat dunia 8 yakni, golongan Barat, golongan Konfusian, golongan Jepang, golongan Islam, golongan Hindu, golongan Ortodox, golongan Amerika Latin, dan golongan Afrika.

Jika pada zaman dahulu untuk menyebarkan sebuah pengaruh atau ajaran dari peradabannya suatu masyarakat perlu menkalukkan atau melakukan kekerasan agar budaya

dalam peradabannya bisa diterima oleh peradaban lain. Akan tetapi pada era globalisasi saat ini, untuk menyebarkan suatu ajaran, ideologi maupun budaya tidak perlu dilakukan dengan melalui kekerasan. Karena kemudahan yang ada dalam globalisasi tersebut dapat dengan mudah menyebarkan barang, jasa, budaya dan lainnya. Majunya teknologi, informasi, komunikasi memudahkan masyarakat dunia mengetahui dengan jelas peristiwa atau perkembangan apa yang terjadi di negara lain. Masyarakat dunia bisa mengetahui budaya dari masing-masing negara atau suku dari berbagai etnis yang ada di dunia ini tanpa perlu berinteraksi secara langsung, karena pada saat ini jarak antar negara bukanlah menjadi halangan untuk informasi baik sosial, ekonomi, budaya dari suatu bangsa untuk diketahui oleh masyarakat negara lain.

Globalisasi yang merupakan sebuah fenomena tidak selalu memberikan manfaat atau dampak positif bagi kehidupan manusia. Karena pada dasarnya setiap fenomena yang ada akan selalu menimbulkan dua sisi yaitu positif (menguntungkan) atau negatif (merugikan). Definisi dari globalisasi sendiri sangat beragam dimana globalisasi dapat didefinisikan dengan majunya sistem teknologi, informasi, dan komunikasi yang menyebabkan perpindahan barang, jasa, informasi dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Kendala jarak bukanlah menjadi halangan bagi suatu individu, masyarakat bahkan negara untuk berhubungan antara satu dengan yang lain. Adanya hubungan tersebut kemudian menjadikan antar individu, masyarakat hingga negara bergantung satu sama lain, baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun pengetahuan.

Kemajuan yang tersedia dalam era globalisasi memunculkan beberapa perspektif dimana para ilmuwan dalam menyikapi globalisasi memiliki perspektif yang berbeda. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa dengan adanya globalisasi akan memberikan manfaat disisi lain ada yang berpendapat justru dengan adanya globalisasi justru perbedaan-perbedaan antar tiap negara baik dalam segi budaya, sosial dan ekonomi akan semakin terlihat. Bagi yang pro terhadap globalisasi umumnya percaya bahwa dengan adanya globalisasi suatu negara akan memiliki kesempatan untuk bersaing dan maju dengan negara lain. Dimana dengan adanya globalisasi perbedaan-perbedaan yang ada di tiap antar negara, masyarakat dan individu dapat teratasi dengan adanya globalisasi. Adanya saling ketergantungan dan keterkaitan satu sama lain akan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada. Disinilah letak kosmopolitanisme sebagai bagian dari globalisasi, dimana dalam kosmopolitanisme selalu mengutamakan penerimaan akan kebudayaan yang beragam. Identitas manusia sebagai bagian dari suatu kelompok kebudayaan yang juga dibarengi dengan keberadaan identitasnya sebagai bagian yang sama.

Jika ilmuwan lain menanggapi globalisasi yang diidentikkan dengan kaburnya batas-batas negara dan peran individu yang semakin bebas ditanggapi sebagian kalangan sebagai suatu hal yang baik dan membawa pada kebaikan bersama. Akan tetapi tidak menurut Kaplan, dimana globalisasi justru memunculkan konflik. Jika sebelumnya perang dan keamanan berkuat pada persaingan dan konfrontasi militer, maka dewasa ini menurut Van Creveld, perang dan keamanan mencakup pergolakan yang

terjadi dengan melibatkan intervensi pemerintah, penggunaan senjata, dan konflik dalam masyarakat (Kaplan 2000, 46). Masalah perang dan keamanan tidak lagi antar negara, melainkan di tingkat yang lebih rendah dalam intern negara yang disebabkan masalah sosial seperti ras dan agama, hingga masalah lingkungan. Dengan kata lain dengan adanya globalisasi justru perbedaan yang ada semakin terlihat dengan jelas tatkala budaya lokal ataupun lokal religion yang ada tidak menghendaki peradaban lain untuk berinteraksi dalam wilayahnya. Hal inilah yang kemudian memunculkan perselisihan dan konflik, sehingga nilai-nilai dalam kosmopolitanisme berupa persamaan dan penerimaan akan identitas budaya yang berbeda antar sesama manusia perlu dipertanyakan kembali.

Disini penulis setuju terhadap pernyataan dari Kaplan, dimana dengan kaburnya batas negara serta peran individu semakin meningkat justru akan memunculkan konflik. Karena dengan kaburnya batas negara kemudian mendorong setiap individu untuk bergerak atau berpindah dari negaranya ke negara lain. Perpindahan inilah kemudian mendorong masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda dengan negara tujuan justru akan menimbulkan selisih paham yang berujung pada terjadinya konflik, baik itu sosial, ekonomi hingga ideologi ataupun keyakinan. Mengacu pada pernyataan Kaplan tentang perang ataupun konflik yang tidak lagi pada persaingan konfrontasi militer, tetapi lebih kepada masalah intern seperti masalah sosial seperti ras dan agama hingga masalah lingkungan. Tidak tersedianya sumberdaya serta keamanan dalam negerinya menyebabkan masyarakat kemudian bermigrasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun mencari

tempat yang aman ataupun perlindungan. Kebudayaan yang berbeda yang dibawa oleh para imigran inilah kemudian berbenturan dengan budaya asli tempat tujuan imigran tersebut (*local religion*).

Selain Kaplan, Samuel Huntington dalam bukunya *clash of civilization* memprediksikan bahwa setelah berakhirnya perang dingin, perang ataupun konflik terjadi bukanlah masalah ideologi lagi. Dimana perang ataupun konflik akan dilanjutkan dengan perang baru yang disebut perang peradaban. Jika selama ini perang lebih banyak terjadi intern dalam peradaban barat, maka perang baru ini adalah perang antara peradaban barat (dipelopori AS dan Eropa) dengan peradaban timur (kekuatan Islam dan Konfusian dalam hal ini China) (Huntington 2000, 338). Budaya-budaya yang berbeda yang ada dalam peradaban ini jika saling berhadapan akan memunculkan konflik karena tidak adanya kesepahaman, selain itu globalisasi juga cenderung menimbulkan superioritas sendiri dari negara-negara yang ada yang menganggap budaya yang dimilikinya lebih unggul dari budaya-budaya yang lain.

Disini kita bisa lihat dari perlakuan yang diberikan oleh masyarakat muslim Eropa. Dimana Islam sebagai peradaban yang dibawa oleh para imigran cenderung mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat lokal Eropa. Disinilah benturan yang terjadi antara budaya-budaya yang berbeda akan menimbulkan konflik tatkala masyarakat lokal yang ada memandang budaya yang baru akan mengancam budaya yang ada dalam masyarakat setempat. Pada saat ini berdasarkan berbagai survei Eropa merupakan salah satu benua dengan pertumbuhan

muslim terbanyak didunia, mengingat Eropa sebagai kiblat dari agama Kristen tentu ini menjadi masalah yang sangat besar bagi pemerintah negara-negara Eropa. Berdasarkan penelitian tahun 2009 pada Pew Forum on Religion and Public Life memproyeksikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk muslim dunia adalah 1,5 persen per tahun, sementara penduduk non muslim hanya tumbuh 0,7 persen per tahun. Penelitian bertitel "*The Future of the Global Muslim Population*" ini memproyeksikan bahwa jumlah penduduk muslim pada 2030 akan mengambil 26,4 persen total populasi dunia yang diperkirakan akan mencapai sekitar 8,3 miliar jiwa. Di Eropa, Pew memprediksi bahwa jumlah penduduk muslim akan meningkat hampir sepertiga dari jumlah sekarang pada 20 tahun ke depan, dari 44,1 juta orang atau enam persen dari total penduduk Eropa pada 2010, menjadi 58,2 juta orang atau delapan persen dari total penduduk Eropa pada 2030. Pada 2030 itu, sejumlah negara Uni Eropa akan mengalami naiknya jumlah penduduk muslim hingga mencapai dua digit prosentase dari total penduduk benua itu (<http://www.muslim-menjawab.com>).

Oleh karena itu untuk menekan laju pertumbuhan dari masyarakat muslim di Eropa, Uni Eropa kemudian mengeluarkan peraturan yang membatasi dan melarang imigran untuk masuk ke wilayah Eropa terutama untuk para imigran muslim. Disini penulis akan mencoba mengangkat kasus bagaimana kondisi para imigran muslim yang ada di Eropa, terutama Perancis yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar diantara negara Eropa. Karena dalam hal ini Islam yang memiliki budaya yang berbeda cenderung diperlakukan

diskriminatif oleh masyarakat Eropa. Perlakuan diskriminatif tersebut semakin diperparah pasca pengeboman WTC (*World Trade Centre*). Pasca runtuhnya WTC tersebut umat Islam mendapatkan tekanan yang luar biasa terutama terhadap muslim imigran yang tinggal di negara-negara Eropa, tidak terkecuali Perancis yang awalnya mengklaim negaranya sebagai negara sekuler yang akan memperlakukan semua penduduknya sederajat, meskipun agama mereka berbeda-beda, serta tidak melakukan diskriminasi terhadap penduduk beragama tertentu.

#### **B. Masuknya Islam di Perancis dan Kebijakan Nicholas Sarkozy dalam Me-nekan Pertumbuhan Muslim di Perancis**

Masuknya peradaban Islam ke Eropa telah dimulai dari sejak berabad-abad yang lalu. Diawali oleh penaklukan negara Andalusia (756-1492) di Semenanjung Iberia, dan kemudian melalui Sisilia, serta penguasaan wilayah Balkan oleh kekhalifahan Utsmaniyyah (1389). Islam semakin banyak berpe-ngaruh di Eropa tatkala Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Mehmed II (Muhammad II) pada tahun 1453 pada masa kekaisaran Ottoman. Pada saat itu Islam mengalami zaman keemasan, Konstantinopel yang merupakan ibu kota Byzantium kemudian berubah nama menjadi Istanbul, Takluknya Konstan-tinopel menjadikan kekaisaran semakin melebarkan ekspansi ke wilayah Balkan dan Eropa tengah pada abad ke 14 dan ke 15. Salah satu peninggalan yang terbesar adalah orang Turki yang hingga saat ini masih aktif dalam melakukan Islamisasi baik bagi penduduk wilayah tersebut, hingga Albania menjadi negara dan penduduk mayoritas muslim hingga saat ini dan beberapa kelompok etnis Slavia, Bosnia Herzegovina, dan beberapa

bagian negara Bulgaria. Pasca berakahirnya Perang Dunia kedua migrasi muslim dari Timur Tengah ke Eropa meningkat, negara-negara yang menjadi tujuan migrasi muslim pasca perang dunia kedua ini umumnya menuju negara-negara seperti Perancis, Jerman, Inggris, Belanda dan negara lainnya.

Pada awalnya masyarakat Eropa terbuka terhadap para imigran muslim yang ada karena masyarakat Eropa pada saat itu membutuhkan para imigran untuk dijadikan tenaga kerja untuk membangun infrastruktur yang rusak pasca Perang Dunia. Perancis yang merupakan negara sekuler banyak menerima imigran yang umumnya berasal dari Aljazair, Maroko dan Tunisia. Arus imigran semakin tinggi ke Perancis tatkala para pekerja imigran yang datang secara individu kemudian mengajak sanak familinya untuk bermigrasi ke Perancis, yang kemudian melahirkan koloni-koloni imigran di-daerah dimana mereka bekerja. Adanya koloni imigran tersebut tentu membuat masyarakat lokal yang ada cenderung bersikap kurang ramah terhadap para imigran terutama muslim. Karena keberadaan Islam sebagai identitas budaya dari para imigran kemudian memunculkan sentimen tersendiri dari masyarakat lokal terhadap para imigran muslim. Perancis yang menganggap dirinya sebagai negara sekuler, dimana masyarakatnya bebas melakukan aktivitas sesuai keyakinan kemudian mengeluarkan peraturan agar kehidupan antar masyarakat lokal dan pendatang bisa hidup berdampingan.

Untuk menghindari sentimen berujung konflik, pemerintah Perancis kemudian pada tanggal 3 oktober 1981 mengeluarkan Undang-Undang tentang hak berserikat dan berkumpul. Undang-undang ini memberikan angin segar

bagi masyarakat muslim karena Negara menjamin kebebasan memeluk dan menjalankan syariat agama masing-masing pemeluknya. Dan inilah kemudian menumbuhkan spirit munculnya organi-sasi-organisasi Islam diseluruh Prancis yang menjadi bagian dinamika dari gerakan dakwah. Untuk mengkoordinasi berbagai organisasi yang tumbuh dan berkembang, maka Perancis membentuk Nationaal Federation of Muslim France atau Federation Nationale des Musulmans de France (FNMF) dan Masjid Paris (Organisation de Islamiques de France) yang berada dibawah naungan Departemen Dalam Negeri Prancis yang sering mengadakan diskusi keislaman di Prancis, menggagas berbagai macam diskusi. Sementara itu, sikap akomodatif dari pemerintah Prancis diwujudkan dalam bentuk conseil Religieux de l'islam en France (Dewan Keagamaan Islam di Prancis) COIRIF di bawah naungan Departemen Dalam Negeri (Kepel 2003, 317).

Seiring berjalannya waktu, imigran-imigran yang ada baik itu dari kawasan Timur Tengah ataupun negara lain tetap berlanjut hingga semakin menambah populasi, terutama imigran muslim. Menanggapi hal ini kemudian pemerintah masing-masing negara Eropa melihat bahwa dengan banyaknya populasi muslim tatanan ekonomi, sosial, budaya masyarakat Eropa cenderung berubah. Ini bisa dilihat dari semakin banyaknya pengangguran yang terjadi hingga peningkatan masyarakat Eropa asli yang memilih memeluk Islam sebagai agamanya. Keadaan ini kemudian diperparah dengan tingkat kelahiran diantara negara-negara Eropa yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jika ini terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin Eropa yang

identik sebagai kiblat agama Kristen akan berubah menjadi agama islam mayoritas. Hal inilah kemudian mendorong pemerintah dari negara-negara Eropa yang ada untuk melakukan tindakan pencegahan agar perkembangan muslim tidak semakin meluas dan meningkat.

Untuk melakukan rencananya kemudian negara-negara Eropa mendapatkan momentum tatkala peristiwa pengeboman WTC (*World Trade Centre*) pada 11 September 2001. Pasca pengeboman WTC kemudian melahirkan istilah Islamphobia dikalangan masyarakat Eropa. Islamphobia merupakan istilah yang ditujukan kepada masyarakat islam, dimana Islam dianggap sebagai agama yang mencintai kekerasan serta selalu diidentikkan dengan terorisme. Islamphobia yang meluas dikalangan masyarakat Eropa menjadikan tekanan dan perlakuan diskriminatif semakin tinggi terhadap masyarakat muslim Eropa. Perancis yang dulu menganggap dirinya sebagai negara sekuler dengan dibebaskan-individu ataupun masyarakat menjalankan aktivitas sesuai dengan keyakinan agamanya, kemudian berubah pasca pengeboman WTC.

Isu pencegahan terorisme yang diangkat oleh pemerintah Perancis semakin menekan muslim yang ada. Dimana pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pelarangan penggunaan simbol-simbol keagamaan seperti pelarangan pemakaian burqah hingga janggut bagi kaum muslim laki-laki. Perancis merupakan negara pertama Eropa yang mengeluarkan aturan tentang pelarangan pemakaian burqah, aturan pelarangan pemakaian burqah kemudian disahkan pada 21 April 2011. Ini tentu melanggar Hak Asasi Manusia, dimana hak-hak muslim sebagai individu di batasi dengan munculnya peraturan

pelarangan penggunaan simbol-simbol keagamaan. Pelarangan akan penggunaan jilbab tentu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena burqah merupakan salah satu identitas dari muslim disamping itu juga dengan memakai burqah ataupun jilbab dalam agama Islam masuk dalam kategori ibadah. Bahkan berdasarkan *The Polish Institute International Affairs* yang mengutip data dari Eurobarometer, diskriminasi terhadap Islam bertambah parah dari tahun ke tahun. Islamofobia menjadi isu serius dalam multikulturalisme di Prancis. Data terbaru menyatakan bahwa Prancis (66%) adalah negara dengan tingkat diskriminasi paling tinggi, kemudian disusul oleh Belgia (60%), Swedia (58%), Denmark (54%), Belanda (51%), dan Inggris (50%). Dibandingkan dengan tahun 2009, terlihat peningkatan signifikan di tahun ini pada Prancis (66%) dan Belgia (60%). Persentase itu naik 30% dibandingkan tahun 2011, dan naik hampir lima kali lipat dibandingkan 1992 (Jessy Ismoyo 2013, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)).

Selain itu juga Nicolas Sarkozy yang pada saat itu menjadi ketua Uni Eropa mendesak pemerintah dari 27 negara anggota Eropa untuk meratifikasi atau menyetujui Undang-undang tentang pembatasan masuknya imigran ke Eropa. Pembatasan masuknya imigran tersebut tertuang dalam EU immigration pact, dengan pernyataan bahwa "*the European Union ... does not have the resources to decently receive all the migrants who hope to find a better life here*" (European Pact on Immigration and Asylum 2013, <http://europa.eu>). Adanya pernyataan tersebut kemudian menjadi dasar kebijakan imigrasi Uni Eropa yang mulai ketat dan restriktif. Kemudian dike-luarkanlah aturan-

aturan imigrasi yang restriktif dari Uni Eropa yang dibagi menjadi dua aturan yang paling gencar dipromosikan Uni Eropa dalam EU Immigration Pact, yaitu kebijakan pengembalian langsung (*return directive*) dan kebijakan skema Kartu Biru (*blue card scheme*). Return device merupakan aturan yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap para imigran ilegal dengan cara mengusir atau memulangkan imigran ilegal tersebut ke negara asal. Sedangkan Blue Card Scheme merupakan aturan dimana imigran ilegal bisa masuk ke Eropa jika imigran tersebut masih dalam satu family yang ada pada keluarga di dalam negara tersebut. Ini dimaksudkan bahwa jika ada imigran masih mempunyai hubungan darah dengan salah satu keluarga yang termasuk dalam 27 negara anggota Uni Eropa mendapatkan pengecualian untuk masuk. Terbitnya peraturan tersebut kemudian mendapatkan kritikan, kritik terhadap peraturan tersebut datang dari organisasi pembela hak azasi manusia seperti Amnesty International mengkritik bahwa pedoman dalam peraturan itu akan mencap para pengungsi dan pemohon suaka sebagai penjahat (<http://www.dw.de>).

Tindakan yang dilakukan oleh Sarkozy dan negara-negara Eropa lain dengan membatasi datangnya imigran terutama muslim menunjukkan adanya kekhawatiran akan tumbuh dan berkembangnya Islam di Eropa serta Perancis khususnya. Pencegahan imigrasi dan pembatasan perekrutan tenaga kerja asing terutama muslim untuk masuk ke Eropa tidak menurunkan jumlah migrasi yang ada. Justru dengan adanya pembatasan tersebut jumlah migran muslim yang masuk ke Eropa khususnya Perancis

makin banyak. Dimana terbentuk pada saat ini setidaknya ada 15 juta kaum muslim di Eropa dengan perkiraan sekitar lima sampai enam juta diantaranya tinggal di Perancis atau sekitar 10 persen dari total 62 juta penduduk Perancis (Pobatingi 2008, 60). Kekhawatiran akan Islam menjadi agama mayoritas Perancis menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Perancis. Dimana parlemen dari Perancis selalu mengeluarkan aturan untuk menekan muslim yang ada di Perancis dengan segala bentuk peraturan yang semakin meminggirkan kaum muslim. Sikap yang ditunjukkan pemerintah Perancis dengan segala bentuk kebijakan dan aturan yang menekan muslim mencerminkan adanya rasa tidak aman dari pemerintah sendiri yang melihat perkembangan muslim yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Kekhawatiran akan tergantinya budaya lokal yang ada dalam hal ini Kristen dengan Islam menjadikan masyarakat lokal kemudian melakukan diskriminasi terhadap imigran terutama muslim. Disinilah pernyataan Kaplan tentang globalisasi yang membawa konflik semakin terlihat tatkala diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah perancis dan masyarakatnya. Konflik disini bukanlah antar negara melainkan antar masyarakat yang tidak menerima budaya yang masuk ke dalam wilayahnya. Globalisasi yang di elu-elukan akan menghilangkan perbedaan justru membuat perbedaan yang ada semakin terlihat. Ketidaksukaan masyarakat lokal Perancis yang berpenduduk mayoritas Kristen terhadap perkembangan Islam di Perancis menumbuhkan rasa sinisme terhadap muslim yang ada disana. Inilah yang kemudian menjadikan landasan dimana world civilization (peradaban islam) jika dihadapkan

dengan lokal religion menjadi suatu masalah yang jika dibiarkan terus berlanjut akan berujung pada terjadinya konflik dengan kekerasan. Eropa yang merupakan kiblat dari peradaban Barat dengan Kristen nya tentu tidak akan menerima jika Islam dengan budayanya mampu menguasai Eropa kembali. Karena sejarah mencatat bahwa pada masa-masa kekhalifahan Islam pernah menguasai Eropa. Tindakan pencegahan terhadap perkembangan Islam diperlukan agar perkembangan Islam tidak menguasai Eropa kembali.

Ada banyak aspek yang menjadikan Perancis membatasi perkembangan muslim disana. *Pertama*, kebudayaan yang berbeda yang dibawa oleh imigran muslim cenderung bertentangan dengan budaya barat yang bebas dari segala aturan. *Kedua*, ketersediaan lapangan kerja menyebabkan antara masyarakat lokal dan imigran atau pendatang menjadi bersaing sedangkan lapangan kerja sangat terbatas yang kemudian mengakibatkan terjadi banyak pengangguran yang semakin menambah beban pemerintah. *Ketiga*, pertumbuhan penduduk perancis sendiri yang cenderung menurun dari tahun ketahun, sedangkan imigran muslim yang menetap di perancis semakin meningkat. Kecenderungan dari masyarakat lokal untuk menerima kebudayaan dari peradaban yang lain inilah yang memicu pemerintah dan masyarakat Perancis melakukan tindak diskriminasi terhadap muslim. Imigran muslim yang dahulu dipandang sebelah mata hanya sebagai pekerja kasar justru mampu berkembang dan meluaskan pengaruhnya di Perancis. Meskipun pemerintah menerapkan berbagai aturan untuk menekan laju pertumbuhan muslim, perkembangan muslim di Perancis justru mengalami

kenaikan di tiap tahunnya. Bahkan banyak dari kalangan masyarakat lokal Perancis sendiri memilih Islam sebagai agamanya. Menurut Harian New York Times (4/2/13), jumlah orang yang pindah agama (ke Islam) di Perancis semakin meningkat setiap tahunnya. Setiap tahun sekitar 150 upacara konversi dari masyarakat lokal Perancis yang menjadi muallaf yang dilakukan di masjid Sahabat di Créteil, Paris. Sedangkan menurut seorang penanggung jawab isu-isu keagamaan di Kementerian Dalam Negeri, Bernard Godard, dari enam juta umat muslim di Perancis, sekitar 100.000 orang adalah muallaf, dan ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 1986 yang hanya sekitar 50.000 orang. Asosiasi muslim mengatakan jumlah muallaf sekitar 200.000 orang (<http://dunia-islam.pelitaonline.com>).

Bertambahnya jumlah muallaf yang ada membuktikan bahwa globalisasi memang tidak bisa dihindari oleh setiap individu, masyarakat bahkan negara. Meskipun pemerintah sangat bersikap reaktif terhadap perkembangan muslim yang ada di Perancis, perkembangannya tetap bertambah karena dengan melalui kemudahan dalam penggunaan teknologi, informasi budaya dan nilai-nilai dari Islam sendiri dapat tersebar luas. Islam pasca pengeboman WTC selalu diidentikkan dengan kekerasan dan terorisme justru mampu menarik minat masyarakat Eropa terutama Perancis untuk semakin mengenal Islam lebih jauh. Tindakan pemerintah Perancis dengan mengeluarkan pertauran-peraturan yang mendiskriminasikan masyarakat muslim disana tentu akan menimbulkan konsekuensi berupa perlawanan dari para muslim Perancis. Meskipun dalam hal ini itu belum

terlaksana, karena jika diskriminasi-diskriminasi sosial yang diterapkan tetap di berlakukan ini akan berdampak buruk sendiri bagi Perancis. Negara yang mengklaim dirinya sebagai negara sekuler perlu dipertanyakan kembali ke sekulerannya, karena jika dilihat dalam setiap aturan yang dikeluarkan pemerintah. Pemerintah ber-sikap seolah hanya menginginkan Kristen sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh rakyat Perancis dan sebagai kiblat dari peradaban Barat tentu tidak menginginkan Eropa dikuasai oleh muslim.

Rasa superioritas yang dibentuk oleh globalisasi terhadap negara-negara Barat termanifestasi dalam perasaan curiga dan kebencian yang terselubung terhadap budaya yang dibawa oleh peradaban lain, rasa superioritas inilah biasanya dikenal dengan Xenophobia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Nicholas Sarkozy bisa dikategorikan dengan Xenophobia, dimana ketidak-mampuan pemerintah untuk membendung perkembangan muslim yang menjadikan Sarkozy mengeluarkan aturan-aturan yang mendiskriminasikan muslim yang ada. Isu terorisme yang di usung menjadi sebuah senjata untuk menekan muslim, hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai kosmopolitanisme yang semestinya dapat menerima setiap perbedaan kebudayaan akibat dari adanya globalisasi tersebut. Disamping itu jika Perancis memang benar-benar sebagai negara sekuler tidak akan mungkin pemerintah akan membatasi serta ikut campur dalam urusan keyakinan setiap rakyatnya.

### **C. Kesimpulan**

Globalisasi memang memberikan dua dampak bagi setiap

interaksi sosial yang ada, menguntungkan bagi satu pihak sedangkan dipihak lain merasa dirugikan. Dalam konteks berkembangnya Islam di Eropa terutama di Perancis, penyebaran Islam dengan adanya globalisasi bisa dikatakan sangat diuntungkan. Karena dengan mudahnya akses informasi dan komunikasi dalam globalisasi menjadikan ajaran Islam bisa menyebar ke seluruh Eropa. Disamping itu juga peran imigran muslim di Eropa dalam menyebarkan ajaran tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan berkembangnya Islam di daratan Eropa. Perancis yang di satu pihak merasa terganggu atau dirugikan dengan adanya perkembangan muslim disana menerapkan berbagai aturan serta kebijakan yang mendiskriminasikan muslim. Disini bisa dilihat globalisasi dengan kaburnya batas negara menjadikan perpindahan penduduk dari suatu negara ke nagara lain tidak bisa dibendung, ini menjadi dampak negatif tersendiri dari globalisasi. Perpindahan penduduk yang membawa budaya masing kemudian bertemu dengan budaya lokal yang sangat berlainan dengan budaya yang dibawa menjadikan masyarakat yang ada kemudian akan memunculkan adanya perselisihan yang berujung pada terjadinya konflik.

Tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam di Eropa menjadi masalah tersendiri bagi tiap negara Eropa meskipun ada sebagian negara Eropa seperti Jerman memberikan kebebasan bagi muslim disana untuk beraktifitas tanpa ada perlakuan diskriminasi dari pemerintah. Akan tidak di Perancis dimana terhadap peradaban dari luar seperti Islam pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membatasi muslim disana

menggunakan hak-hak nya seperti berjabab dan lainnya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah perancis, Nicholas Sarkozy menunjukkan bahwa keengganan dari pemerintah serta masyarakat lokal yang ada untuk menerima kenyataan akan muslim sebagai bagian dari masyarakat Perancis. Adanya diskriminasi terhadap budaya lain yang masuk ke dalam wilayahnya membuktikan jika ada ketakutan dari pemerintah sendiri akan hilangnya budaya lokal dan tergantikan dengan budaya islam sebagai mayoritas. Jika masalahnya terletak pada ketakutan akan budaya luar (peradaban Islam) menguasai wilayahnya itu juga bergantung dari bagaimana masyarakat mempertahankan budaya lokal yang ada tanpa harus memusuhi Islam sebagai identitas budaya. Karena jika dilihat dari banyaknya muallaf dari masyarakat lokal Perancis membuktikan jika agama lokal yang ada belum mampu untuk memuaskan batin dari masyarakat perancis sendiri akan pengetahuan tentang Tuhan. Sehingga tidak seharusnya pemerintah memperlakukan masyarakat imigran muslim disana berbeda dengan imigran yang lain. Karena sekeras apapun pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menekan pertumbuhan muslim, budaya serta ajaran yang ada semakin meluas dan bertambah tiap tahun di Perancis.

### Daftar Pustaka

- European Pact on Immigration and Asylum*, diakses di [http://europa.eu/legislation\\_summaries/justice\\_freedom\\_security/free\\_movement\\_of\\_persons\\_asylum\\_immigration/jl0038\\_en.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0038_en.htm), 23 Juni 2013.
- Gilles Kepel, *Pergerakan Islam di Amerika dan Eropa*, Yogyakarta: jendela, 2003. Hasil penelitian, Pertumbuhan Penduduk Muslim 2 kali lebih cepat dari penduduk Non-muslim, diakses di <http://www.muslim-menjawab.com/2012/06/hasil-penelitianpertumbuhan-penduduk.html>, 24 Juni 2013.
- Islam di Eropa: Jumlah Muallaf Di Perancis Semakin Meningkat*, diakses di <http://dunia-islam.pelitaonline.com/news/2013/02/05/islam-di-eropa-jumlah-muallaf-di-perancis-semakin-meningkat#.UcjrrNlhnoJ> 25 Juni 2013.
- Jessy Ismoyo, *Islamophobia di Perancis : Identitas Imigran Perempuan Muslim Magribi*, diakses di [sosbud.kompasiana.com/2013/06/15/islamofobia-di-perancis-identitas-imigran-perempuan-muslim-magribi-565330.html](http://sosbud.kompasiana.com/2013/06/15/islamofobia-di-perancis-identitas-imigran-perempuan-muslim-magribi-565330.html), 22 Juni 2013
- Kaplan, Robert D. *The Coming Anarchy*, in *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post-Cold War*. New York: Random House, 2000.
- Lawrence E. Harrison, Samuel P Huntington, dkk, *Kebangkitan Peran Budaya*, LP3ES: Jakarta, 2006.
- Pabottingi, Mochtar, *Potret Politik Kaum Muslim di Perancis dan Kanada*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta ,2008.
- Samuel P Huntington, *Benturan Antar Peradaban*, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002.
- Uni Eropa ingin Seragamkan UU Imigrasi*, diakses di <http://www.dw.de/uni-eropa-ingin-seragamkan-uu-imigrasi/a-3422015>, 23 Juni 2013

